

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan adalah salah satu sektor keuangan yang mampu berkembang dengan pesat dan menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar dalam pembangunan nasional. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pembangunan ekonomi nasional, hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat memerlukan bantuan dana atau modal dari bank. Bank merupakan industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, sehingga kesehatan bank perlu dijaga likuiditasnya agar bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua nasabah. Perbankan merupakan salah satu perusahaan *go public* sehingga harus memberikan kinerja perusahaan yang baik kepada internal dan eksternal perusahaan.

Perusahaan perbankan dalam pasar modal menarik perhatian bagi para investor untuk berinvestasi, dikarenakan sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang menunjang perekonomian nasional dan juga sebagai salah satu peran utama dalam penguatan dan pengembangan ekonomi. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan, mulai dari penilaian asset, utang, likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya, berdasarkan laporan keuangan dapat dihitung rasio keuangan untuk dapat menilai tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan

operasional. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja perbankan.

Persaingan di dunia perbankan semakin meningkat yang disebabkan karena banyaknya bank beroperasi di Indonesia dan masyarakat yang selektif dalam memilih bank, sehingga tingginya persaingan akan mempengaruhi pengelolaan bank dalam menjaga kelangsungan perusahaan. Tingginya persaingan akan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank, maka dari itu antar bank harus bisa menjaga kinerja. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi *intermediary* yang berarti menghimpun dana berupa simpanan dari pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan.

Adanya persaingan yang semakin ketat di dunia perbankan menyebabkan bank harus melakukan penyaluran kredit dengan teliti, sehingga permasalahan yang terjadi salah satunya kredit macet dapat dihindari, jika bank memberikan kredit tanpa melihat risiko yang akan diterima maka kredit tidak dapat ditutup dengan modal bank. Bank yang tidak mampu mengembalikan kredit dan uang nasabah bank menunjukkan bahwa kinerja bank tersebut buruk sehingga akan sulit untuk memperoleh dana dan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Kinerja adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu perusahaan (Sedarmayanti, 2017:289). Dengan mengetahui kinerja yang dicapai, bank dapat menilai tingkat keberhasilan pelaksanaannya sehingga bank dapat menentukan strategi untuk masa yang akan datang. Mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan *Return On Asset*. *Return On Asset* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba. Semakin tinggi *Return on Asset*

menunjukkan peningkatan kemampuan bank menghasilkan laba dan peningkatan baik penggunaan aset bank.

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*idependency*), dan kewajaran (*fairness*). *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu pengendalian internal perusahaan guna mengelola risiko yang signifikan dengan mendorong terbentuknya manajemen yang bersih dan sehat. Tujuan utama tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk melindungi pemangku kepentingan dari manajemen yang tidak bersih dan tidak sehat.

Lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia ditandai dengan masih terjadi penurunan kinerja perusahaan yang awalnya meningkat tetapi mengalami penurunan. Berdasarkan data dari laporan profil industri perbankan, kondisi perbankan Indonesia pada akhir tahun 2019 berjalan baik ditandai dengan tumbuhnya permodalan bank (CAR) sebesar 23,31% dari tahun sebelumnya sebesar 22,97% atau naik sebesar 43 basis point. Bersamaan dengan naiknya jumlah permodalan (CAR), bank diharapkan mampu dalam menaikkan jumlah keuntungan atau laba (ROA) yang dihasilkan. Namun pada akhir tahun 2019 bank pemerintah malah mengalami penurunan dalam menghasilkan laba (ROA) dari semula 3,08% menjadi 2,81%. Skandal kasus perbankan juga terjadi pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) yang adanya penyelewengan dana nasabah antara pihak internal dan eksternal perusahaan sebesar Rp 20 miliar pada tahun 2020 (Detik, 2020). Munculnya kasus perbankan yang telah diuraikan disebabkan oleh buruknya manajemen bank atau tata kelola perusahaan (GCG).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapan *Good Corporate Governance* yang dinilai dapat memperbaiki citra perbankan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong peningkatan kinerja. Penerapan *Good Corporate Governance* akan tercapai jika terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal. Unsur internal seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajer perusahaan yang termasuk didalamnya kepemilikan oleh dewan direksi dan komisaris. Kepemilikan manajerial berperan untuk menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Adanya kepemilikan manajerial menyebabkan manajer akan lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan karena manajer akan ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil. Kepemilikan manajerial yang semakin besar mengindikasikan akan terjadinya penurunan tindakan manipulasi oleh manajer. Kepemilikan manajerial yang meningkat akan mampu mendorong turunnya potensi kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Hasil penelitian Apriningsih (2016), Setiawan dan Setiadi (2020), dan Sulton (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Novitasari (2019), Hadyan (2021) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan

saham oleh pihak yang terbentuk dalam institusi seperti institusi pemerintah, swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik kinerja keuangan perusahaan, sehingga mampu mengontrol manajemen perusahaan agar lebih teliti dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Bintang, dkk (2018), Christina dan Arthur (2019), dan Hadyan (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Feliani (2017), Novitasari (2020), dan Setiawan dan Setiadi (2020) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari prinsipal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka keputusan yang dibuat lebih mengutamakan kepada kepentingan perusahaan, sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Widyastuti (2017), Christina dan Arthur (2019), Setiawan dan Setiadi (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Ekasandya (2018), Hadyan (2021),

dan Novitasari (2019) menyatakan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *good corporate governance*. Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk menjaga independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam menjalankan dan bertanggung jawab atas segala tugasnya memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian Novitasari (2019), Amelinda dan Rachmawati (2021), Yumina dan Misa (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Wijaya (2018), Novitasari (2019), Rosiana dan Mahardika (2020), dan Hadyan (2021) menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Dewan Direksi merupakan bagian perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan. Menentukan kebijakan strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perusahaan. Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan. Selain itu, semakin banyak

anggota dewan direksi, akan membangun jaringan positif dengan pihak luar perusahaan, hal tersebut akan membuat kinerja perusahaan semakin terarah. Hasil penelitian Eksandya (2018), Rosiana dan Mahardika (2020), Anjani (2019) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Amelinda dan Rachmawati (2021), Christina dan Arthur (2019), dan Novitasari (2019) menyatakan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
- 2) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
- 3) Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
- 4) Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

- 5) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah11, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai peran kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit yang berkaitan dengan kinerja keuangan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan untuk mendorong seluruh karyawan agar dapat menerapkan serta meningkatkan mekanisme *good corporate governance* sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dapat dikatakan suatu dasar teori yang membuat model proses kontrak antara dua orang atau lebih. Teori keagenan (*agency theory*) dipopulerkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1996). Teori ini muncul ketika ada hubungan kontrak kerja sama antara manager dan pemegang saham yang digambarkan sebagai hubungan antara *agent* (manajemen), *principal* (pemegang saham). Hubungan kontrak kerja sama tersebut berupa pemberian wewenang oleh *principal* kepada *agent* untuk bekerja demi pencapaian tujuan *principal*. Manajer diangkat oleh pemilik untuk menjalankan operasional perusahaan karena pemegang saham memiliki keterbatasan dalam mengelola perusahaan.

Teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai *principal* membangun sebuah kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*).

Literatur akuntansi mengenai pengungkapan sukarela seringkali mengacu kepada konsep keagenan dengan menyediakan dorongan untuk melakukan pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela pada *website* perusahaan atau

IFR terhadap laporan keuangan. Dorongan tersebut ditunjukkan pada literatur sebagai alat penggerak yang dipakai untuk mengurangi asimetri informasi antara agent dan principal. Asimetri informasi dan perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Kondisi ini mengarah pada tata kelola perusahaan yang kurangnya keterbukaan transparansi tentang kinerja perusahaan ke prinsipal. Teori keagenan berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola dalam suatu organisasi.

Pengungkapan dan transparansi adalah aspek penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Teori keagenan menyediakan kerangka kerja yang menghubungkan pengungkapan dengan tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan diterapkan untuk mengendalikan masalah keagenan dan memastikan perilaku manajer sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dalam perspektif teori agensi, ada dua hubungan antara kebijakan pengungkapan perusahaan yaitu hubungan komplementer substitusi. Hubungan komplementer terjadi ketika mekanisme tata kelola perusahaan, memperkuat kontrol internal dan meminimalkan kemungkinan bagi manajer untuk menahan informasi demi kepentingan mereka sendiri.

Hal ini mengarah pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengungkapan yang komprehensif. Oleh karena itu, jika tata kelola perusahaan saling melengkapi, dan kemudian dapat memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan, perusahaan juga akan cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela. Di sisi lain, hubungan substitusi muncul ketika mekanisme tata kelola

dapat mengurangi asimetri informasi dan perilaku oportunistik manajer yang menurun karena adanya pemantauan dan pengungkapan.

2.1.2 Bank

Menurut Kasmir (2016:3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Adapun pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan jenis-jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Kasmir (2016 :4) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Bank menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clering*), penagihan

surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *Letter of credit (L/C)*, *Safe deposit Box*, bank garansi, *bank Notes*, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

2.1.3 Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang memiliki tujuan untuk memberi informasi keuangan mengenai jumlah aktiva, kewajiban, dan modal bank pada periode tertentu, memberikan informasi mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu, memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal bank serta memberikan informasi mengenai kinerja manajemen bank dalam suatu periode (Kasmir, 2015:6). Semua perusahaan baik bank maupun non-bank pada suatu periode selalu melaporkan laporan keuangannya dalam laporan keuangan. Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu bentuk per manajemen terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan tersebut, sesuai dengan fungsi manajer keuangan, yaitu: merencanakan, mencari, memanfaatkan dana-dana perusahaan, dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan perusahaan tujuan manajer dalam hal memaksimalkan nilai perusahaan. Tercapai tidaknya tujuan ini dapat dilihat dan diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan. Tugas seorang manajer keuangan memang berat karena dalam praktiknya tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham semata, tetapi juga memastikan berbagai kepentingan manajemen itu sendiri, kreditur, *supplier*, dan pelanggan (Kasmir, 2015:6).

2.1.4 *Good Corporate Governance*

Dalam buku *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam praktik bisnis* Hamdani (2016:20) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*. Definisi ini menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi.

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan bahwa pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *Good Corporate Governance (GCG)* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

Dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG harus menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*),

akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Berikut uraian prinsip-prinsip GCG yang berlaku secara umum :

1. *Transparency* (transparansi)

Prinsip dasar transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan perusahaan serta harus menyediakan informasi yang material dan relevan agar mudah diakses dan mudah dijangkau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip dasar akuntabilitas merupakan adanya suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Prinsip dasar *responsibility* adalah suatu prinsip dimana suatu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang panjang.

4. Independensi

Prinsip dasar dalam independensi merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip dasar dalam kesetaraan dan kewajaran adalah suatu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham dari pihak manajemen secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Rodoni, 2015:177). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen tersebut. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan menimbulkan *agency conflict* dan salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan prestasi laba, karena manajerial dapat menciptakan keinginan bagi direktur untuk lebih dekat memonitor para manajer. Adanya kepemilikan manajerial, akan membuat manajer menjadi lebih giat untuk memenuhi keinginan dari para pemegang saham.

Komposisi kepemilikan berkaitan dengan siapakah pemegang saham, dan yang penting adalah siapa di antara pemegang saham dalam kelompok pengendali. Kepemilikan saham manajerial merupakan persentase yang dimiliki oleh anak

cabang perusahaan beserta afiliasinya (Astria, 2011). Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham oleh pihak internal atau manajemen yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan. Manajemen memegang peranan sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, sehingga dalam menjalankan tanggung jawab akan cenderung melakukan hal yang terbaik.

Adanya kepemilikan manajemen ini akan meningkatkan keseimbangan informasi antara pemegang saham dan manajemen, sehingga mampu mengurangi masalah yang ditimbulkan dalam *agency theory*. Menurut teori ini, permasalahan antara prinsip dan agen ini dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan keduanya.

Manajemen cenderung lebih giat dalam bekerja jika proporsi kepemilikan lebih banyak dimiliki oleh manajemen tertentu, karena tidak ada manfaat lain yang akan didapat oleh dirinya sendiri. Semakin besarnya proporsi kepemilikan manajemen, maka manajer lebih berleluasa dalam mengatur keputusan dan kebijakan untuk perusahaan. Kebijakan yang dapat ditentukan secara bebas antara metode akuntansi dan keputusan terkait masa depan perusahaan. Hal menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan manajemen dengan integritas laporan keuangan. Peningkatan atas kepemilikan manajemen akan membuat kekayaan manajemen secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan manajemen perusahaan sehingga manajemen akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengurangi resiko kerugian perusahaan. Kepemilikan manajemen pada umumnya melakukan pembiayaan terhadap nilai investasi dimasa yang akan datang bersumber dari biaya internal, hal ini berakibat pada rendahnya tingkat dividen

yang dibayarkan kepada pihak *shareholder* karena akan berimbas kepada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan (Suteja, 2020:85). Presentase kepemilikan yang diperoleh dari penjumlahan atas presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Melalui proses *monitoring* secara efektif, institusional kepemilikan mampu mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengurangi tindakan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan adanya akualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen.

Keberadaan investor dapat menunjukkan *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk *memonitoring* perusahaan pada umumnya dan manajemen khususnya. Tindakan *monitoring* tersebut dapat menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat *monitoring* yang sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Tindakan *monitoring* oleh pihak investor institusional dapat mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer dapat lebih fokus perhatiannya terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan manajemen dengan para pemegang saham. Adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak institusional dapat membatasi perilaku manajer.

2.1.7 Dewan Komisaris

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik mendefinisikan dewan komisaris adalah perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan pemegang saham.

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris bahwa dewan komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam agenda dan strategi. Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta memastikan terlaksanakannya akuntabilitas.

Komposisi ukuran dewan komisaris di dalamnya terdapat komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Akan tetapi, dewan komisaris tidak diizinkan untuk serta dalam pengambilan keputusan operasional.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang anggota dewan dan dewan komisaris emiten atau perusahaan jumlah dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang dewan komisaris dan satu di antara anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris dan satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

1) Tugas Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik, dan memberi

nasihat kepada direksi. Dewan komisaris wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.

2) Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan publik apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Anggota dewan komisaris telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan emiten atau perusahaan publik. Anggota dewan komisaris juga tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3) Wewenang Dewan Komisaris

Dewan komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya. Dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan emiten atau perusahaan publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

2.1.8 Dewan Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang pengurus dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik mendefinisikan manajemen adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan tujuan dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang dibutuhkan dalam perusahaan? Apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimalkan permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Larasati, 2017). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Semakin besar kebutuhan akan

hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi, dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan control (Larasati, 2017).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, jumlah koleksi emiten atau publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi dan satu diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

1) Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan tujuan dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab direksi. Melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap akhir tahun buku.

2) Tanggung jawab Direksi

Setiap anggota direksi bertanggung jawab atas kerugian emiten atau perusahaan public yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan publik apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan emiten atau perusahaan publik. Anggota direksi tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian dan mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3) Wewenang Direksi

Direksi berwenang mewakili emiten dan perusahaan publik di dalam dan di luar pengadilan. Anggota direksi tidak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila terdapat perkara di pengadilan antara emiten atau perusahaan publik dengan anggota direksi yang bersangkutan. Anggota direksi yang berkepentingan yang berkepentingan dengan kepentingan emiten atau perusahaan publik. Anggota direksi yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah anggota direksi yang tidak memiliki kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris didirikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.9 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh

dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance diperusahaan-perusahaan.

Peraturan Bapepam melalui Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 yang ditujukan untuk setiap karyawan dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Dalam peraturan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tersebut menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seseorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sedikitnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

1) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan public. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2) Wewenang Komite Audit meliputi

Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Komite audit berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit. Komite audit melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

2.1.10 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan yaitu tercapainya suatu prestasi dari perusahaan selama periode tertentu atas pengelolaan keuangan perusahaan maka dengan prestasi, suatu perusahaan bias menunjukkan bagaimana kinerjanya (Kasmir, 2019:7).

Keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dapat dilihat dan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional. Penilaian kinerja disini adalah suatu metode dan proses pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan. Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, perusahaan perlu memiliki suatu ukuran untuk mengukur bagaimana pencapaian sasaran dan tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kinerja sebagai gambaran hasil pelaksanaan suatu kegiatan operasional merupakan hal vital dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kinerja perusahaan secara umum biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor, dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham, serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Pada penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan akan dinilai dari rasio profitabilitas.

2.1.11 Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2018) menyatakan bahwa Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan baik itu sehubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun ekuitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan, terutama laporan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2015:196). Tingkatan profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Asset* (ROA). Rasio ROA ini sering digunakan manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut. Nilai ROA yang mendekati 1, berarti profitabilitas perusahaan akan meningkat baik karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif atau rugi, hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.

Dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai indikator kinerja atau Kinerja Bank. ROA digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan - perusahaan multinasional khususnya dari sudut pandang profitabilitas dan kesempatan berinvestasi (Hanafi dan Halim, 2012:157). ROA menunjukkan efektivitas

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka ROA semakin tinggi, yang berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank, karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. ROA merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan ke dalam seluruh aktiva perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. ROA menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba.

Aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional. Bank dengan total aset relatif besar akan memiliki kinerja yang lebih baik karena memiliki total *revenue* yang relatif besar sebagai akibat penjualan produk yang meningkat. Meningkatnya total pendapatan tersebut maka akan meningkatkan laba perusahaan sehingga kinerja keuangan akan lebih baik.

UNMAS DENPASAR

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2017) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Jumlah Dewan Direktur, Ukuran Dewan Direktur, Proporsi Komisaris Independen, *Debt to Equity Ratio*, *Corporate Social*

Responsibility dan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* yang diproksikan melalui proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di BEI, sedangkan *Good Corporate Governance* yang diproksikan melalui jumlah dewan direktur, *Institutional Ownership*, dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Penelitian yang dilakukan oleh Bintang, dkk (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Komisaris Instiusional, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Instiusional dan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan variabel komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan instiusional secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan (ROA). Secara parsial variabel komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), variabel dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), variabel kepemilikan instiusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Eksandya (2018) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Good Corporate Governance (GCG) yang diukur dengan dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, komite audit dan variabel terikat kinerja keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi data panel dengan *software Eviews for windows versi 9.0*. Hasil penelitian menyatakan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi, dkk (2019) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage Dan Firm Size* Terhadap Kinerja Keuangan”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, komite audit dan dewan komisaris independen, *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* dan *firm size* yang diukur dengan *Return On Equity (ROE)* dan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cristina dan Arthur (2019) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Good corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen dengan variabel terikat kinerja keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan variabel persentase kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan, variabel komposisi dewan direksi secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, variabel komposisi komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, variabel persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Henli dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dengan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan uji secara parsial menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan dan Komite Pemantau Risiko berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana (2020) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dengan variable terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Setiadi (2020) yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Barang Konsumsi Di BEI”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial dengan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan GCG yang terdiri dari komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA), komite audit independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA), dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Rulintiawati (2020) yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi) Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Komite Audit,

Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen dengan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2021) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dengan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis menggunakan analisis data berupa data panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa keempat prinsip penerapan *good corporate governance* yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan komite audit yang secara individual berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2021) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dengan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan Kepemilikan Manajerial (KM) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA), Dewan Komisari Independen (DKI) secara parsial

berpengaruh negatif terhadap Kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA), Komite Audit (KA) secara parsial berpengaruh positif Kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila, dkk (2021) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan institusional dengan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan kepemilikan institusional sebagai proksi dari variabel GCG berpengaruh negatif terhadap ROA yang dijadikan sebagai tolak ukur pada variabel kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadyan (2021) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan”. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit dengan variabel terikat Kinerja Keuangan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan secara parsial kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Namun hasil secara simultan menunjukkan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.